

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan

a. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).²⁰ Pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan sarana yang individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka. Pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat. Selain itu makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas. Dimana pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri.²¹

b. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: *Pertama*, bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi. *Kedua*, pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran. *Ketiga*, pandangan tersebut diatas, jika dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praktis pemberdayaan.²²

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2017), 59.

²¹ Mustagin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Progam Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 2, No.1(2017),63

²² Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), 3.

Pemahaman pemberdayaan ini adalah sebagai cara untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat yang mengalami situasi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dimaksudkan bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi juga ketidakberdayaan dalam hubungan sosial, dan ketidakberdayaan dalam segi ekologi. Sumodiningrat memandang bahwa pemberdayaan merupakan hasil interaksi pada tingkat ideologis maupun praktis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan mengandung makna keberpihakan kepada masyarakat sebagai kelompok yang tidak memiliki keberdayaan.²³

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri “menguasai sumberdaya yang menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya²⁴. Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan.²⁵ Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁶

Sementara, Moh Ali Aziz mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong

²³ Sumodiningrat, *Membangun Indonesia dari Desa* (Jakarta: Media Pressindo, 2016), 99.

²⁴ Budiman Sujatmiko, *Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Pembanguan Kawasan Perdesaan berdasarkan Undang-Undang Desa*.

²⁵ Sulistiyani dan Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 77.

²⁶ Edy Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 60.

untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan perikehidupan mereka.²⁷ Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya.

Berbagai pengalaman empiris dan historis yang berformat sosial ekonomi telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan antara lain:

Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasihkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.

Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang *power to everybody*. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak nirmatir manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri

Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *power to nobody* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistik adalah

²⁷ Moh Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2005), 136.

power to powerles, artinya memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah.²⁸

Menurut Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal tersebut tidak hanya ekonomi yang meningkat tapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.²⁹ Pemberdayaan menurut Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat Huud, ayat 61 sebagai berikut:

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهِم صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا
فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".³¹

²⁸ Mardi Yatmo Hartomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi”6 Juli 2000. <http://www.bappenas.go.id>

²⁹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Progam IDT dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 37.

³⁰ Nani Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 29.

³¹ Alqur'an, al-Huud ayat 61. *Alqur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Penerbit dan Percetakan Menara, 2001)

Kata (استعمرکم فی الارض) *ista'marakum fi al-ardh* dalam arti mengolah bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dan kondisi yang memungkinkan manfaatnya dapat dipetik, seperti membangun pemukiman untuk dihun, masjid untuk tempat ibadah, tanah untuk pertanian, taman untuk dipetik buahnya dan rekreasi. Penggalan ayat tersebut bermakna bahwa Allah swt telah mewujudkan melalui bahan bumi ini, manusia yang Dia sempurnakan dengan mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkannya fitrah berupa potensi yang menjadikan ia mampu mengolah bumi dengan mengalihkannya ke suatu kondisi dimana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya. Sehingga, ia dapat terlepas dari segala macam kebutuhan dan kekurangan dan dengan demikian, ia tidak untuk wujud kelenggengan hidupnya kecuali kepada Allah swt.³²

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.³³ Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya mengandung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber daya pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sodaqoh, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian. Maka program pemberdayaan desa wisata merupakan salah satu wujud dari misi pertama yaitu pembangunan ekonomi dan bisnis.

Pada hakikatnya inti Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dari pemberdayaan berada pada diri manusia/dan faktor luar diri manusia/rakyat hanyalah berfungsi sebagai

³²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta:Lentera Hati,2002)Volume 5,666-667.

³³ Amin Abdullah, dkk, *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*(Yogyakarta: PT Tiara Wacana,2000),74.

stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, serta untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui 3 sisi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini
- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.³⁴

Pemberdayaan sering dipahami dan terbatas pada aspek sosial antropologi secara umum. Artinya bila melihat suatu komunitas masyarakat sudah terlihat baik dan sejahtera

³⁴ Mustagin,dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Progam Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.1, Desember 2017

secara umum, maka pemberdayaan masyarakat dianggap berhasil. Hal seperti ini indikatornya kurang jelas karena memuat aspek-aspek sosial antropologis yang berlaku secara komunal atau yang terlihat secara umum. Segala sesuatu yang berlaku secara umum, belum tentu menjelaskan kondisi riil setiap individu. Semestinya tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat berdasar pada pendekatan secara ekonomi keluarga, sehingga indikatornya jelas. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi menggunakan indikator kesejahteraan, yang di ukur dengan prinsip dasar Kerja-Utong-Menabung, mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, serta memiliki tabungan.³⁵

Ujung dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi *swadiri* (mampu mengurus dirinya sendiri), *swadana* (mampu membiayai keperluan sendiri), dan *swasembada* (mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan).³⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

c. Tahapan Pemberdayaan

Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup (*on going*) dan sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan juga tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Sebagai suatu program, pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.³⁷ Tahapan pemberdayaan merupakan salah satu langkah dimana lembaga melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap

³⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia dari Desa* (Jakarta: Media Pressindo, 2016) 99.

³⁶ Randy R Wrihatnolo dan Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 117.

³⁷ Ishandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), 172.

komunitas atau masyarakat disekitarnya. Berikut tahapan pemberdayaan masyarakat diantaranya:³⁸

1) Penayadaran

Dimana kegiatan penayadaran yang dilakukan meliputi proses pengenalan potensi diri dan lingkungan serta membantu komunitas untuk merefleksikan dan memproyeksikan keadaan dirinya, baik dalam berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan domestik maupun kekuatan global dalam bentuk informasi, teknologi, modal sosial, budaya dan peluang politik.

2) Pengorganisasian

Tahapan ini merupakan tahapan dimana suatu organisasi dan kelembagaan harus beralah dari prakasa masyarakat secara sukarela serta diadakanaya suatu penguatan organisasi.

3) Kaderisasi

Suatu tahapan dimana suatu organisasi mempersiapkan kaderkader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas pendampingan setelah progam berakhir.

4) Dukungan Teknis

Dukungan teknis ini diberikan pada proses produksi yang mencakup dukungan untuk memperbaiki proses atau teknologi yang sedang digunakan.

5) Pengelolaan Sistem

Dukungan teknis ini diberikan pada proses produksi yang mencakup dukungan untuk memperbaiki proses atau teknologi Tahapan pemberdayaan ini akan berjalan dengan baik bila adanya keterlibatan warga dalam pengembangan desa wisata menjadi hal yang penting karaena dari wargalah yang lebih mengetahui dan memahami akan potensi wilayahnya.³⁹Selain itu dukungan dari pihak-pihak eksternal

³⁸ Roza Linda, "(Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai)", *Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kosim Riau dalam Jurnal Al-Iqtishad* Edisi 2 Vol.1 (2016):4

³⁹ Destha titi Raharjana, "Membangun Pariwisata Bersama Rakyat:Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau", *Pusat Studi Paiwisata Universitas Gadjah Mada dalam Jurnal Kwistara* 2, No 3(2012):225.

seperti dukungan para POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan pemerintah kota. Karena keterlibatan untuk menciptakan masyarakat yang terbedaya membutuhkan dukungan dari semua pihak.

yang sedang digunakan.

2. Perekonomian

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang bearti peaturan rumah tangga. Dengan kata lai pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga bukan hanya merujuk pada satu keluarga melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.⁴⁰

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah:⁴¹

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi, pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang diterima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka

⁴⁰ Iskandar Putong, “*Economics Pengantar mikro dan makro*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)1

⁴¹ Hermanita, *Perekonomian Indonesia.*, 111-112.

terima. Dengan pendapatan yang mereka terima ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi, kualitas sumberdaya manusia akan semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sehingga kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

d. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Ibnu Khaldun telah memberikan definisi bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif, maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan kesejahteraan individu. Prinsip dasar sistem ekonomi islam sendiri secara garis besar :

- a. Kebebasan individu, individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam.
- b. Hak terhadap harta, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

- c. Ketidasmaraan ekonomi dalam batas yang wajar, islam mengakui adanya ketidasmaraan ekonomi antara orang perorangan tetapi tidak membiarkanya menjadi tambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d. Kesamaan sosial, islam tida menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakan kesamaan sosial sehingaa sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tida hanya dinikmati oleh sekkelompok tertentu masyarakat saja.
- e. Jaminan sosial, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara , islam dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokok masing-masing.
- f. Distribusi kekayaan secara meluas, islam mencegah penumpukan kekayaan peda kelompok kcil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat , pemberantas kelaparan dan kemlaratan.⁴²

3. Desa Wisata

a. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan dari atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisis yang berlaku. Atraksi dalam hal ini bisa berupa seluruh kehidupan kesehaian masyarakat desa setempat dengan lokasi fisik yang bisa mengundang wisatawan untuk bercampur dengan kehidupan tersebut, seperti berlatih membatik, menari, dan bahasa. Sementara itu, akomodasi yang dimaksud bisa berupa sebagian tempat tinggal penduduk setempat dan unit-unit yang berkembang atas kosep tempat tinggal penduduk.

⁴² Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : AlafRiau Graha UNRIPRESS, 2007), 6

b. Pendekatan Desa Wisata

Sebuah desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan beberapa pendekatan. Namun hendaknya pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan potensi desa setempat. Beberapa pendekatan yang dilakukan⁴³, yaitu:

1) Pendekatan Pasar Pengembangan Desa Wisata

a) Interaksi Langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal atau bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Cara ini dapat dilakukan apabila masyarakat yakin benar bisa mengontrol daya dukung, potensi, maupun dampak-dampak yang ditimbulkan.

b) Interaksi Setengah Langsung

Bentuk-bentuk *one day trip* yang dilakukan wisatawan, kegiatan antara lain dalam bentuk makan dan berkegiatan bersama penduduk setempat. Prinsip model ini adalah wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama penduduk.

c) Interaksi Tidak Langsung

Pendekatan ini dilakukan dengan menganggap bahwa sebuah desa wisata mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Wujud pengembangan desa wisata dilakukan dengan penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos, dan sebagainya.⁴⁴

Untuk model pendekatan ini diperlukan kriteria, yaitu:

a) Atraksi Wisata

Yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil kreativitas penduduk setempat. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.

b) Jarak Tempuh

Jarak tempuh disini bisa berarti jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat

⁴³ Eny Anjayani, *Desaku Masa Depan* (Klaten: Cempaka Putih, 2007), 26.

⁴⁴ Suryo Sakti Hadjiwo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 85.

tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibu kota provinsi dan jarak dari ibu kota kabupaten.

c) Besaran Desa

Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung desa terhadap kepariwisataan menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa.

d) Sistem Kepercayaan dan Kemasyarakatan

Mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem yang ada.

e) Ketersediaan Infrastruktur

Meliputi fasilitas pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dan lain sebagainya.⁴⁵

2) Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata

Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standart khusus dalam mengontrol dan menerapkan aktivitas konservasi. Terkait dengan pendekatan ini terdapat beberapa tindakan yang merupakan implementasi dari pendekatan fisik,⁴⁶ yaitu:

- a) Melakukan konversi rumah-rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur tinggi dan mengubah fungsinya menjadi museum desa.
- b) Melakukan konservasi desa serta menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa serta mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata.
- c) Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi didalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil.

Berdasarkan ketiga model tersebut, maka prinsip-prinsip dasar dari pengembangan fisik desa wisata tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Eny Anjayani, *Desaku Masa Depan*, 28.

⁴⁶ Suryo Sakti Hadjiwo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, 86.

- a) Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan didalam atau dekat dengan desa
- b) Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, atau dapat bekerjasama dengan pihak luar
- c) Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau sifat atraksi yang lekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.⁴⁷

c. Tipe-tipe Desa Wisata

Berbagai bentuk desa wisata kini telah banyak dikembangkan di Indonesia. Secara umum, cara ini telah mampu meningkatkan tingkat perekonomian penduduk. Desa wisata di Indonesia kemudian berkembang menurut pola, proses, dan tipe pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut, desa wisata di Indonesia terbagi dalam dua tipe yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

1) Tipe Terstruktur(*enclave*)

Tipe ini mempunyai ciri-ciri:

- a) Lahan terbatas dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memiliki keunggulan dalam pertumbuhannya sehingga mampu menembus pasar internasional
- b) Lokasi terpisah dari masyarakat lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat terkontrol
- c) Lahan tidak terlalu besar dan masih mampu dikoordinasikan sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi mengembangkannya, dengan membangun hotel misalnya.

2) Tipe Terbuka

Tipe ini kental dengan adanya karakter yang tumbuh dan menyatu dalam struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Perolehan pendapat dari wisatawan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat lokal. Namun demikian, dampak

⁴⁷ Suryo Sakti Hadjiwo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, 87.

negatifnya pun cepat menjalar dalam masyarakat, sehingga sulit dikendalikan.⁴⁸

4. Pariwisata Syariah

a. Definisi Pariwisata Syariah

Dalam tradisi Islam di kenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *siyar* (السير), *safar* (السفر), *al-siyahah* (السياحة), *al-ziyarah* (الزيارة), atau (الرحلة). Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyahah* untuk konsep *wisat* (*tourism*). Secara bahasa *al-siyahh* berarti pergi kemana saja dengan motif apasaja (mutlakmuqayyad). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyahah* dalam beberapa tempat. Terdapat beberapa pandangan dalam islam mengenai perjalanan dan wisata , diantaranya ialah:

- 1) Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
- 2) Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Taubah:112

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاعِدُونَ
الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:”Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”. (Q.S Al-Taubah: 112)

⁴⁸ Eny Anjayani, *Desaku Masa Depan*, 29.

- 3) Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dengan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya.(Q.S al-An'am:11-12 dan al-Naml 69-70)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ

Artinya:“Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” (Q.S Al-An'am : 11)

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَ كُفْرَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya:”Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman.” (Q.S Al-An'am : 12)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ

Artinya:”Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.”(Q.S An-Naml : 69)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

Artinya:”Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan.” (Q.S An-Naml :70)

- 4) Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.

Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional. Sehingga, pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi juga non muslim.⁴⁹

Selain itu pariwisata syariah juga diartikan sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.⁵⁰ Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

⁴⁹ Fahadil Amin AL hasan, ”Pe nyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ”al-ahkam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no.1 (2017):2

⁵⁰ Kemenpar, ”*Kajian Pengembangan Wisata Syariah*”<http://kemenpar.go.id>

b. Perbandingan Wisata Halal dan Konvensional

Tabel 2.1

Perbandingan Wisata Halal dan Konvensional

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1.	Objek	Alam, budaya, heritage, kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spiritualitas	Meningkatkan Spiritualitas dengan cara menghibur
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritualitas yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan diri	memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4.	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan
5	Fasilitas	Sekedar	Sekedar	Menjadi bagian

	Ibadah	pelengkap	pelengkap	yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	umum	umum	spesifik yang halal
7	Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata	komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	<i>Integrated</i> , interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	setiap waktu	waktu-waktu tertentu	memperhatikan waktu ⁵¹

c. Kriteria Wisata Syariah

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Sejalan dengan yang dianjurkan *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria umum pariwisata syariah ialah:

- 1) Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum
- 2) Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan
- 3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat
- 4) Bebas dari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi⁵²
- 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan
- 7) Bersifat universal dan inklusif

⁵¹ Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia Potential and Prospect* 7, no.3(2017:):9

⁵² Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Buku Republika, 2012), 57.

8) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifn lokal.⁵³

d. Panduan Umnum Pariwisata Syariah

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan hotel, destinasi wisata,SPA, Sauna, Massage,Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.⁵⁴

Berikut beberapa Panduan Umum dalam Pariwisata Syariah:

1) Daya Tarik/Objek Wisata Syariah

Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a) Objek Wisata melalui wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan
- b) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci
- c) Tersedia makanan dan minuman halal
- d) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah
- e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan

2) Akomodasi Pariwisata Syariah

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI). Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:

- a) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
- b) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
- c) Tersedia makanan dan minuman halal
- d) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis

⁵³ Riyanto Sofyan,*Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*,58.

⁵⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*,NO:108/DSN-MUI/X/2016,<http://dsnmui.or.id>

- e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan
- 3) Usaha Penyedia Makanan dan Minuman

Seluruh restoran, kafe dan jasa boga di objek wisata syariah harus dijamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses memasaknya.⁵⁵
- 4) Spa, Sauna dan Massage

Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, diantaranya:

 - a) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita
 - b) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi
 - c) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya
 - d) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.
- 5) Biro perjalanan wisata syariah
 - a) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah
 - b) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah
 - c) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI
 - d) Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah
 - e) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi.⁵⁶
- 6) Pramuwisata (Pemandu Wisata) Syariah

Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan berikut ini

⁵⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Buku Republika, 2012), 59.

⁵⁶ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Buku Republika, 2012), 58

- a) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama berkaitan dengan fikih pariwisata
- b) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah jujur, dan bertanggung jawab
- c) Memiliki kompetensi kerja sesuai standat profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
- d) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustaghin dengan judul ***“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji”***⁵⁸ Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini adalah memiliki persamaan dengan meneliti tentang pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata, selain itu juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak dengan adanya desa wisata maka masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program desa wisata. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sikap yang ada dengan berkembangnya desa wisata. Adanya perilaku yang mempengaruhi masyarakat dalam hal ini dipandang dari meningkatnya pendapatan masyarakat seiring berkembangnya desa wisata. Program desa wisata yang ada di Desa Bumiaji dapat digunakan sebagai salah satu rujukan program desa wisata yang akan datang.

Hadi Santoso dengan judul ***“Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism) di Kota Bima”***⁵⁹. Hadi Santosos memaparkan bahwa Penelitian yang bertujuan mengetahui karakteristik spesifik yang dimiliki Kota Bima dalam mendukung pengembangan wisata berbasis syariah (*Halal Tourism*) di Kota Bima yang didukung dengan kearifan lokal Bima. Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan

⁵⁷ Fahadil Amin AL hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," al-ahkam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no.1 (2017):2

⁵⁸ Mustaghin *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, No 1,(2017)7

⁵⁹ Hadi Santoso Dalam Jurnal: *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 15 No. 3 (2018)18

dilakukan ini adalah memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti tentang wisata berbasis syariah dan kesiapan untuk menjadi destinasi wisata syariah, selain itu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini mempunyai perbedaan yang dilakukan oleh Hadi Santosos yakni pada penelitian terdahulu hanya fokus pada wisata syariahnya, sedangkan penelitian ini juga pada strategi pemberdayaan desa wisata, selanjutnya objek penelitian terdahulu dilakukan di Bima, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kandri, Semarang.

Arifi Dalam Zaenal Tesis Universitas Islam Indonesia (2012) "***Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata(studi kasus AMAN-Asosiasi Asongan Mandalika***" memaparkan bahwa dengan adanya desa wisata Kuta cukup memberikan andil bagi peningkatan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Melalui sektor wisata alam, kerajinan, dan sosial budaya, masyarakat merasakan adanya peningkatan *income* yang secara otomatis berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu kehadiran wisata Desa Kuta juga telah membuka aneka ragam peluang kerja bagi masyarakat seperti pedagang kaki lima/pedagang asongan, bisnis travel, pemandu wisata, training-training kepariwisataan dan lain sebagainya.

Noor Roman dengan judul "***Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat***"⁶⁰ Noor Roman memaparkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi warga dalam manajemen desa wisata. Tidak hanya memfasilitasi pemahaman mereka tentang pariwisata lokal tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan dan keputusan dengan mengikutsertakan pandangan masyarakat setempat. Merangsang partisipasi masyarakat lokal dalam proses manajemen membentuk landasan penting untuk pengembangan desa wisata yang sukses, serta memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap masyarakat setempat.

Andri Kisroh sunyigono dalam "***Pemberdayaan Masyarakat Tergusur Akibat Pembangunan Bendungan Nipah-Sampang Madura Melalui Pengembangan Kawasan***

⁶⁰ Noor Roman Dalam Jurnal: *Jurnal Equilibria*, Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 1, No 1, (2016)3

Desa Wisata Syariah⁶¹ Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini adalah memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti tentang desa wisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT), dan juga membahas wisata syariah, selain itu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan masyarakat terdampak akibat pembangunan bendungan, sedangkan penelitian ini membahas tentang desa wisata ditinjau dalam perspektif wisata syariah, selanjutnya objek penelitian terdahulu dilakukan di Madura, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kendri, Semarang.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian terdahulu secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada cakupan bahasan penelitiannya yaitu tentang pemberdayaan desa wisata dengan menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan membahas tentang desa wisata ditinjau dalam perspektif wisata syariah, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang desa wisata.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶¹ Andri Kisroh Sunyigono, Masyarakat Terdampak Akibat Pembangunan Bendungan Nipah-Sampang Madura Melalui Pemberdayaan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Syariah ;*Jurnal Ilmiah Pangabdhi*,3 No 2 (2018)

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

